

Analisis Praktek Ekstradisi Terhadap Terpidana Kasus Korupsi Dan Pencucian Uang Yang Disidangkan Secara In Absentia (Studi Kasus Terpidana Hesham Al Warraq) = THE ANALYSIS OF THE EXTRADITION PROCESS OF HESHAM AL WARRAQ (A CASE STUDY OF CORRUPTION AND MONEY LAUNDERING TRIAD IN ABSENTIA)

Andry Agustiano, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920534729&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini dibatasi pada kasus dengan terpidana Hesham Al Warraq yang disidangkan secara in absentia dengan lingkup pembahasan pada analisis mengenai praktek ekstradisi terhadap terpidana tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk menjawab permasalahan penelitian bahwa ekstradisi terhadap terpidana kasus korupsi dan pencucian uang yang disidangkan secara in absentia sulit dilakukan karena terdapatnya faktor kepentingan nasional, faktor ketersediaan perjanjian ekstradisi, faktor alasan mutlak dan fakultatif penolakan ekstradisi. Merujuk dari temuan penelitian diketahui beberapa hal. Pertama, praktek ekstradisi terhadap terpidana kasus korupsi dan pencucian uang Hesham Al Warraq yang disidangkan secara in absentia, jika hanya mengandalkan Model Treaty on Extradition sebagai hukum kebiasaan internasional ekstradisi akan menyebabkan peluang dikabulkannya permohonan permintaan ekstradisi dari Indonesia sebagai negara peminta oleh Arab Saudi sebagai negara diminta menjadi sangat tipis kemungkinannya. Hal ini mengingat dalam Model Treaty on Extradition tersebut terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur bahwa peradilan secara in absentia merupakan alasan yang bersifat mutlak untuk menolak ekstradisi, selain ketentuan mengenai warga negara yang bersifat fakultatif. Kedua, Resolusi PBB Nomor 55/25 tanggal 15 Nopember 2000 tentang United Nation Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Resolusi PBB Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 tentang United Nation Convention against Corruption (UNCAC) telah tepat dijadikan landasan hukum pada praktek ekstradisi ini, di tengah kekosongan perjanjian ekstradisi kedua negara, karena tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Hesham Al Warraq merupakan tindak pidana yang pelakunya wajib diekstradisikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketiga, praktek ekstradisi terhadap kasus korupsi dan pencucian uang Hesham Al Warraq yang disidangkan secara in absentia menjadi sulit untuk dilaksanakan akibat adanya faktor kepentingan nasional, ketersediaan perjanjian ekstradisi, alasan yang bersifat mutlak berupa peradilan in absentia dan alasan yang bersifat fakultatif berupa kewarganegaraan orang yang diminta untuk menolak ekstradisi yang masing-masing

memiliki keterkaitan satu sama lain. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) ekstradisi lebih berorientasi pada landasan hukum berupa UNTOC dan UNCAC; (2) mempersiapkan permintaan agar terpidana dapat menjalani hukuman di negara diminta sesuai Artikel 16 butir 12 UNTOC dan Artikel 44 butir 13 UNCAC; (3) meningkatkan frekuensi

diplomasi untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi bilateral.

.....The thesis focuses on the case of Hesham Al Warraq, a convict tried in an absentia trial of corruption and money laundering. The study is limited to the analysis of the extradition process and factors influencing such process in order to answer the problem stating that an extradition process of a convicted of corruption and money laundering cases who is tried in absentia trial is difficult to execute due to some factors, such as: the existing national interests, the availability of extradition treaties, the absolute reasons and the facultative rejection of extradition. The results of the research reveals that: first, it is almost never successful to execute an extradition if the requesting country only relies on the Model Treaty on Extradition as the customary law of international extradition due to the fact that the Model Treaty on Extradition clearly states that an absentia trial is an absolutely reason to reject an extradition request in addition to facultative stipulations on citizenship; second, it is appropriate to employ the UN Resolution No. 55/25 dated November 15, 2000 on the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and the UN Resolution No. 58/4 dated October 31, 2003 on the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) as the legal basis on the extradition because the two countries do not have an extradition treaty yet; and third, the extradition process of Hesham Al Warraq as the convict of corruption and money laundering case cannot easily be executed because of some reasons as mention above. The author recommends (1) to execute an extradition that is oriented on legal bases such UNTOC and UNCAC; (2) to prepare a request so that the convict can serve his or her sentence in the requested country as stated in Article 16 Clause 12 of UNTOC and Article 44 Clause 13 of UNCAC; and (3) to improve diplomatic relationships in order to realize a bilateral extradition treaty.